

MEDIA KALTIMTARA

JUMAT,
17 NOVEMBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA

BEGINI CARA UNIK BUPATI SYARWANI TINJAU PROYEK INFRASTRUKTUR

BACA HALAMAN 2



BRIMOB POLDA KALTARA KEKURANGAN PERSONEL

BACA HALAMAN 12



Begini Cara Unik Bupati Syarwani Tinjau Proyek Infrastruktur

TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani memiliki gaya tersendiri dalam meninjau progres pengerjaan proyek infrastruktur di Bulungan.

Seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu, rombongan menaiki motor trail saat menuju pembangunan proyek infrastruktur, di beberapa wilayah Kota Tanjung Selor. Kemudahan menggunakan kendaraan roda dua itu, pasalnya dapat menjangkau semua akses hingga ke desa-desa, utamanya pada desa yang masih sulit dilalui kendaraan roda empat.

Kepada wartawan, Bupati Bulungan, Syarwani menjelaskan, beberapa kali kunjungan ke desa-desa atau Kecamatan di Bulungan, menggunakan kendaraan roda dua. Karena, ada kemudahan tersendiri utamanya pada akses yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.

“Iya, kita lakukan secara rombongan,” tuturnya.

Hal itu dilakukan, selain memang dirinya memiliki hobi mengendarai motor trabas untuk menikmati keindahan alam Bulungan. Juga upaya mengunjungi masyarakat di desa terpencil untuk mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat.

Paling banyak, kata Syarwani keinginan masyarakat berkaitan dengan kondisi pemenuhan kebutuhan. Seperti pada aspek kesehatan,

pendidikan dan ekonomi serta infrastruktur dasar. “Kalau kita bicara masyarakat Hulu Sungai Kayan tentu kaitanya dengan bagaimana pemenuhan infrastruktur yang selama ini terus diupayakan,” katanya.

Baru-baru ini, Pemda Bulungan mendapat apresiasi langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apresiasi itu, berkaitan dengan capaian pada

aspek pendidikan. “Kita apresiasi atas pencapaian itu, tentunya ada hal yang kurang terus kita benahi,” jelasnya.

Prestasi tersebut, mesti dijadikan sebagai motivasi dan tidak gampang puas diri untuk berkreasi. “Inovasi dan kreatif dalam pengajaran diperlukan, apalagi dengan adanya sistem kurikulum merdeka belajar,” tuturnya. (adv/tin/and)





Bupati Bulungan, Syarwani saat melaunching bahasa lokal masuk kurikulum pendidikan.

Eksistensi Bahasa dan Budaya Harus Dipertahankan

TANJUNGSER – Beberapa bahasa lokal di Kabupaten Bulungan, masuk dalam kurikulum pendidikan. Seperti bahasa Dayak Tidung dan Bulungan.

Bupati Bulungan, Syarwani saat dikonfirmasi mengatakan, tiga bahasa lokal tersebut masuk dalam kurikulum pendidikan, sebagai bentuk penguatan budaya, salah satunya mengenai bahasa daerah.

“Ini kita lakukan sebagai bentuk penguatan budaya lokal,” ujar Syarwani, Kamis (16/11/2023)

Dengan masuknya tiga bahasa lokal ini, diharapkan dapat memudahkan untuk dipelajari. Dengan begitu, bahasa lokal tidak mudah tergerus seiring berkembangnya zaman.

Masuknya tiga bahasa lokal ini, ditandai dengan launching kurikulum muatan lokal (Mulok) bahasa dan sastra daerah. Pemkab Bulungan, kata Syarwani sangat serius dalam upaya mempertahankan dan membangkitkan kembali penggunaan bahasa hingga adat istiadat masyarakat

asli Bulungan.

“Dalam kesempatan saya berbicara dengan kelompok masyarakat adat. Bagaimana kita harus menarasikan dan menulis tentang bahasa, hingga budaya masyarakat asli dalam bentuk dokumen,” ucapnya.

Syarwani berharap, tiap prosesi perkawainan atau sejenisnya dari tiga etnis ini, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orangtua terlebih dahulu. “Yang kita catat hari ini, banyak belajar soal budaya oleh generasi terdahulu,” bebernya.

Apa yang dilakukan hari ini, kata dia merupakan langkah maju dengan mencatat, menarasikan dalam konteks bahasa yang kemudian diajarkan ke sekolah dalam bentuk kurikulum muatan lokal.

Syarwani menambahkan, OPD terkait di lingkungan Pemkab Bulungan harus bersinergi bagaimana mengangkat dan mempromosikan bahasa dan budaya asli daerah. Tidak hanya dalam kegiatan formal pendidikan

saja. Namun juga melalui konten media sosial di kalangan anak muda.

“Bulungan ini, banyak konten kreator dan pengikutnya jutaan. Namun, sayangnya belum banyak yang mempromosikan kebudayaan asli Bulungan,” ungkapnya.

Kedepan, konten kreatif tersebut diharapkan dapat mengisikan kontennya dengan mentautkan bahasa lokal didalamnya. Sehingga anak Bulungan tetap memiliki memori tentang bahasa daerah.

Hal lain, mengapa perlunya bahasa lokal muat dalam kurikulum pendidikan, bertujuan untuk menjaga eksistensi bahasa dan budaya asli Bulungan. “Kita telah mengeluarkan regulasi soal penerapan bahasa lokal dalam kurikulum pendidikan,” tukasnya.

Saat ini, sudah 20 sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal bahasa daerah. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah. (adv/tin/and)



Sediakan space khusus bagi pencinta olahraga skateboard.

Siapkan Ruang Khusus untuk Pencinta Olahraga Skateboard

TANJUNG SELOR – Pembenahan Infrastruktur pendukung, terus digenjut oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Hal itu, dilakukan sebagai bentuk daripada akselerasi dan pemerataan pembangunan serta terpenuhinya fasilitas layanan publik. Fasilitas layanan publik tersebut, salah satunya sarana olahraga skatepark di taman tepi Sungai Kayan.

Kepada wartawan, Bupati Bulungan, Syarwani menjelaskan, skatepark merupakan arena rekreasi yang digunakan untuk seluncuran papan skateboard, sepeda BMX, skuter dan aggressive inline skating atau olahraga ekstrim, yang digandrungi oleh kalangan muda.

“Sarana olahraga ini, dibangun menggunakan APBD Bulungan tahun 2023, senilai Rp 720 juta,” ucap Syarwani.

Dia melanjutkan, pembangunan Skatepark di tepian Sungai Sabanar dimaksudkan supaya aktivitas masyarakat tidak hanya berpusat di tepian Jalan Katamso-Kampung Arab, tetapi pemerintah hadir menyediakan space khusus bagi pencinta olahraga skateboard.

“Kita menyediakan space di Taman Sabanar Lama,” tuturnya.

Kedepan, lanjut Syarwani pembangunan sisi belakang skatepark, dikoneksikan dengan jembatan penghubung yang hanya bisa dilalui pejalan kaki. Jembatan penghubung nantinya dibuat tematik bulat melengkung di atas sungai yang bisa digunakan menjadi tempat berfoto.

“Sisi belakang nantinya bisa dilanjutkan untuk dibangun lapangan bola voli, voli pantai, lapangan sepakbola mini yang tidak terlalu rumit dan membutuhkan lahan yang luas,” paparnya.

Disekitar kawasan skatepark, bakal dilengkapi ruang

dan fasilitas permainan untuk anak-anak. Sedangkan sisi kanan skatepark atau tepian sungai yang mengarah ke Kuliner Tepi Kayan (Kulteka) juga sedang direncanakan dibangun fasilitas olahraga lain. Yang dibangun secara minimalis dan lebih mengutamakan fungsinya.

“Diharapkan banyak pilihan ruang untuk masyarakat, baik sekadar berkumpul bersama keluarga, maupun berolahraga sore,” tandasnya. (adv/tin/and)





Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina

Pembangunan Perumahan Menjamur, Pelaku Bisnis Properti Harus Perhatikan PBG

TANJUNGREDEB - Beberapa bulan terakhir, pembangunan perumahan di Berau tampak menjamur. Sehingga, kegiatan bisnis properti yang mengelola aset berupa tanah dan bangunan disorot Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Ia menegaskan, pebisnis properti harus memperhatikan izin mendirikan bangunan, atau yang saat ini dikenal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). "Saya imbau untuk memperhatikan izin mendirikan bangunan rumah karena itu ada undang-undangnya," ungkapnya.

Dirinya mendorong pihak devel-

oper properti memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pembangunan rumah.

Namun, Elita meyakini developer lahan atau pengembangan properti bangunan rumah sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. "Itu harapan kami. Kita juga berharap dari pemerintah daerah dan OPD terkait juga melakukan pengawasan dengan adanya pembangunan perumahan," ucapnya.

Tujuan pengawasan tersebut, lanjutnya, agar tidak menciptakan kondisi pemukiman yang kumuh. "Sehingga kami berharap para devel-

oper properti untuk saling bersinergi mewujudkan penataan ruang perumahan yang rapi serta bebas banjir," ujarnya.

Kendati demikian, Politikus Golkar ini menilai, inovasi Pemkab Berau pada saat ini mengenai adanya bisnis properti menjadi ladang pemenuhan tenaga kerja lokal di Bumi Batiwakal. "Kita juga tidak bisa menghalang inovasi kinerja Pemkab Berau yang sedang berlangsung, karena itu juga berdampak multiplayer efek untuk pemberdayaan tenaga kerja lokal," pungkasnya. (adv/and)

Soroti Maraknya Calo dalam Pengurusan KTP

TANJUNGREDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung menyoroti maraknya pencaloan dalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurutnya, harus ada pengawasan berkala dalam persoalan tersebut.

Dia menegaskan, pengawasan harus dilakukan terus menerus. Pasalnya, pengurusan KTP berkaitan dengan pelayanan publik. "Pencaloan harus dihapuskan, agar kepengurusan berkas masyarakat bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada," ungkapnya.

Dirinya menilai, pencaloan sangat sulit untuk dilepaskan, karena masyarakat ingin seluruh urusan mengenai berkasnya selesai dalam waktu yang singkat. "Tetapi agar tidak semakin marak, pihak OPD terkait harus selektif. Jika sifatnya calo, sebaiknya tidak dilayani. Namun, jika ingin membantu orang, tidak mas-

alah," katanya.

Namun, dengan sistem online yang telah dikeluarkan Disdukcapil Berau, lanjut Nurung, segala pengurusan akan lebih mudah.

"Tapi untuk sistem online ini, cara penggunaannya harus terus disosialisasikan, terutama untuk warga di kampung-kampung. Karena kalau warga yang dari kampung biasanya kurang mengerti sistem online," ujarnya.

Selain itu, Politikus NasDem ini juga mengimbau agar Disdukcapil memprioritaskan masyarakat yang sangat memerlukan tanda kependudukan, khususnya bagi mereka yang jauh dari pusat ibukota Tanjung Redeb. "Masyarakat jangan dipersulit, karena selaku warga negara dan berdomisili di tempat itu, maka berhak untuk mendapatkan identitas. Jadi saya berharap pelayanan Disdukcapil ke depannya bisa lebih baik lagi dan jauh dari calo," tutupnya. (adv/and)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung

Dukung Pengadaan Depo Arsip Baru



Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah

TANJUNG REDEB - Adanya rencana pembangunan depo kearsipan dokumen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pada 2024 mendatang direspons positif jajaran legislatif.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah mengungkapkan, kondisi Kantor Arsip dan Dokumentasi saat ini tidak memungkinkan menyimpan banyaknya berkas yang kian membludak. "Menurut saya tidak masalah tambah depo arsip baru. Yang penting mereka segera menganggarkan ke Bapelitbang," ungkapnya.

Dia mengaku sangat mendukung pengadaan depo arsip Dispusip Berau. "Apalagi anggaran APBD kita tahun depan sangat besar yaitu mencapai Rp 5 triliun. Sehingga menurut saya tidak masalah itu," ujarnya.

Politikus Hanura itu mengimbau agar Kadispusip Yudha Budisantoso untuk terus mem-follow up Bupati Berau, Sri Juniarsih. "Jangan ke PUPR, karena mereka pelaksana saja. Nanti yang merencanakan Bapelitbang dan Dispusip harus langsung minta arahan dari Bupati," bebernya.

Pasalnya jika Bapelitbang dan Bupati Berau menyetujui pengadaan gedung depo arsip baru tersebut dapat dipastikan kebutuhan tempat berkas setiap opd terkait bisa terpenuhi. "Kalau Bupati menyetujui lalu Bapelitbang yang merencanakan sepakat maka dapat dipastikan kebutuhan depo bisa terpenuhi," imbuhnya.

Sebab kata dia peran DPRD yaitu persoalan tambah gedung depo arsip baru sangat setuju. "Karena kami di sini hanya berperan menyetujui anggaran dengan tepat guna, ke depannya bisa berfungsi maksimal depo baru tersebut," pungkasnya. (adv/and)

Penguraian Masalah Tanah Negara Cukup Rumit

TANJUNG REDEB - Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah negara

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, persoalan penguasaan tanah negara tersebut merupakan isu lama dan baru muncul saat ini. "Permasalahannya, baik itu masalah tanah dengan masyarakat maupun masyarakat bersama perusahaan," ungkapnya.

Dia menilai, untuk mengurai permasalahan penguasaan tanah negara tersebut cukup rumit. Sebab semua penguasaan tanah memiliki aturan. "Bahkan dari beberapa tempat lainnya, sebagian punya tanah dan yang lainnya punya tempat," jelasnya.

Karena disebutkannya memang ada beberapa indikasi surat tanah hanya asal dibuat tanpa melihat isi maksud tujuan. "Sehingga permasalahan-permasalahan harus segera diurai, dan diselesaikan," ujarnya.

Alhasil pihaknya meminta perlu ada ketegasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta harus mulai dari bawah. "Mulai dari tingkat kepala kampungnya dan dari pihak BPN-nya," terangnya.

Termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurutnya harus berkoordinasi dengan instansi terkait. "Yaitu mulai dari tingkat RT, kampung sampai ke BPN. Sebab beberapa yang kita tanya itu malah seolah-olah berjalan sendiri. Kita inginkan ada kolaborasi supaya masalah tanah bisa clear," tandasnya. (adv/and)



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

Nilai Penting, Kualitas Ikan Hasil Nelayan Harus Diperhatikan

TANJUNG REDEB - Kualitas ikan hasil tangkapan dinilai Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto sangat penting untuk diperhatikan. Maka dari itu, dirinya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memperhatikan hal tersebut.

Dia menerangkan, kualitas ikan hasil tangkapan perlu diperhatikan karena sebagai bentuk tindak lanjut gebrakan pemerintah pusat ke tingkat kabupaten/kota agar mengadakan kampanye gemar makan ikan sebagai upaya pencegahan dini stunting. "Kami meminta dinas perikanan juga memperhatikan kualitas bahan baku ikan segar dari tangkapan nelayan," ucapnya.

Dirinya membeberkan, rerata hasil ikan laut segar dari daerah pesisir selatan Kabupaten Berau dijual ke luar kota. "Rata-rata 70 persen ikan segar dari Berau dijual ke Bontang, Sangata, Samarinda dan Balikpapan," ungkapnya.

Politikus Golkar ini menilai, ikan laut segar banyak dijual ke luar kota



Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto

karena harga pasaran yang lebih terjangkau. "Bisa juga karena harga jual di sana lebih baik, info ini saya dapat langsung dari nelayan," katanya.

Agar ke depan ikan laut segar tidak lagi diperjualbelikan ke luar

kota, Subroto meminta OPD terkait melakukan survei pasar. "Tujuannya adalah agar seluruh harga ikan yang dijual sama, meski tidak tinggi, tetapi harganya sama dengan luar daerah," imbuhnya.

Dengan demikian, kebutuhan ikan segar di Kabupaten Berau bisa selalu terpenuhi untuk konsumsi anak-anak maupun masyarakat umum. "Dan jangan sampai program kita tidak satu arah. Satu arah maksudnya pemerintah menggebu-gebu ajak anak sekolah gemar makan ikan, tetapi kenyataannya hasil nelayan ini tidak bisa di backup dari pemerintah," tuturnya.

Dirinya sangat menyangkanikan dengan kualitas terbaik bisa saja ke depan bakalan laku terjual di luar kota.

"Contoh ikan putih, ikan merah yang bisa dikatakan lari keluar kota. Kita dikatakan cuma bisa mendapatkan mutunya kurang. Jadi ini harus ada sinergi antara Pemkab dan Dinas Perikanan," pungkasnya. (adv/and)



Kapal pengangkut sampah milik DLHK Berau yang beroperasi di Sungai Kelay dan Sungai Segah.

Penanganan Sampah di Sungai Belum Maksimal, DLHK Berau Sebut Terkendala SDM

TANJUNGREDEB - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau memiliki dua kapal pengangkut sampah yang beroperasi di Sungai Segah dan Sungai Kelay. Namun, belum dapat berfungsi maksimal.

Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Penanganan Limbah DLHK Berau, Suhadi tak menampik persoalan tersebut. Dikatakannya, kapal sampah hanya bisa beroperasi maksimal ketika kondisi air sedang pasang.

"Jika air sungai sedang surut, maka akan sulit untuk mengambil sampah yang ada," ungkapnya, Rabu (15/11/2023).

Dirinya membeberkan, pengop-

eriasi kapal sampah tersebut saat ini bukan ditangani oleh tenaga ahli bidang pengangkut sampah via air.

"Tenaga pekerja saat ini itu bukan yang ahli di bidangnya, jadi dari bidang lain kita pekerjakan mengangkut sampah di sungai. Hal itulah yang menjadikan kinerja tidak maksimal," bebernya.

Meski memiliki beberapa kendala, pihaknya tentu tetap optimistis untuk mengurangi sampah yang ada di bantaran sungai, agar bisa tetap bersih terutama dari sampah plastik.

"Rencananya, tahun depan ada penambahan dua unit kapal pengangkut sampah seperti yang sudah ada," ujarnya.

Selain itu, peran penting masyarakat untuk mengurangi sampah ditekankannya sangat penting. Menurutnya, walaupun banyak kapal pengangkut sampah di Kabupaten Berau namun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan masih minim, tentu hal itu sulit terselesaikan.

"Masih banyak masyarakat tinggal di bantaran sungai yang masih suka membuang sampah di sungai. Hal itulah yang perlu kita kurangi juga, tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan harus ditingkatkan lagi," tandasnya. (and)



Produksi beras di Berau alami penurunan akibat fenomena El Nino.

El Nino jadi Salah Satu Penyebab Produksi Padi di Berau Menurun

TANJUNG REDEB - Produksi beras di Kabupaten Berau alami penurunan. Ada beberapa faktor pemicu, salah satunya fenomena El Nino. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Berau, Junaidi mengungkapkan, dampak dari El Nino adalah fenomena kenaikan suhu dan kemarau panjang.

"Kalau kemarau terjadi berkepanjangan, kekeringan pasti akan terjadi. Sehingga, bisa berpengaruh buruk kepada hasil panen padi para petani," ungkapnya, Kamis (16/11/2023).

Diamembeberkan, penurunan produksi beras tak hanya terjadi di Bumi Batiwakkal. Tetapi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Timur. "Hal itu kami ketahui saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu," jelasnya.

Meski penurunan diklaim Junaidi, dirinya tak dapat memberi data valid. Sebab, belum sepenuhnya ter-input dengan lengkap di aplikasi khusus Distanak Berau.

Dirinya menambahkan, El Nino bukan satu-satunya penyumbang penyebab turunnya produksi padi. Faktor lainnya adalah alih fungsi lahan yang belakangan ini marak terjadi.

"Apalagi regenerasi petani san-

gat minim, akibat kurangnya minat anak muda terjun ke pertanian dan memilih bekerja di industri pertambangan," imbuhnya.

Faktor produksi yang semakin lama semakin mahal juga menjadi pengaruh besar. Misalnya, pupuk non-subsidi yang mahal dan pupuk subsidi yang terbatas. "Memang banyak faktor untuk peningkatan produksi beras di Berau, tidak bisa hanya fokus pada satu penyelesaian masalah," tegasnya.

Sementara, di tengah produksi beras menurun, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Usaha dan Perdagangan Diskoperindag Berau, Hotlan Silalahi.

Dijelaskannya, kenaikan harga kebutuhan pokok terjadi akibat kemarau panjang di beberapa wilayah, sehingga stok yang ada semakin menipis.

"Kalau isu yang beredar terkait keterlambatan pada pengiriman masuk ke Berau itu tidak benar, namun karena banyak petani yang mengalami gagal panen," terangnya.

Hotlan menambahkan, untuk kenaikan harga beras sendiri itu bah-

kan dari para produsennya langsung, yang membuat para pedagang turut menaikkan harga.

"Sebenarnya bukan karena biaya transportasinya, tapi kalau dari produsennya naik mau tidak mau para pedagang yang ada di pasar turut menaikkan harga," tambahnya.

Selain beras, harga daging juga saat ini tengah mengalami kenaikan, karena beberapa peternak sapi belum masuk musim panen.

"Karena belum masuk musim panen, hal itulah yang menyebabkan harga daging naik Rp 10.000 per kilogramnya," sebutnya.

Mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang ada di pasaran, Diskoperindag sendiri akan kembali menggelar pasar murah yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat agar bisa meringankan kebutuhan sehari-hari.

"Tak hanya dari Diskoperindag, kita akan bekerja sama dengan Bulog untuk menyelenggarakan pasar murah dalam waktu dekat ini, pasar murah kita agendakan kembali setelah kami mensurvey beberapa harga kebutuhan pokok di pasar yang mengalami kenaikan," tandasnya. (and)



Sekretaris Daerah (Sekda) Tarakan, Hamid Amren.

UU ASN Terbaru, PPPK Bisa Duduki Eselon I

TARAKAN - Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) baru saja disahkan oleh DPR RI pada Selasa, 3 Oktober 2023 lalu.

Dengan perubahan UU ASN ini, kini Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat menduduki Eselon I. PPPK juga dinyatakan bisa mengisi jabatan struktural hingga mendapat jaminan pensiun sama seperti PNS.

Sebelumnya undang-undang aparatur sipil negara diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 namun, sekarang mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam undang-undang yang baru tersebut, disesuaikan dengan perkembangan terkini.

"Intinya itu adalah dengan undang-undang itu menginginkan aparatur sipil negara berkompetensi global, berkompetensi kelas dunia," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Tarakan, Hamid Amren, Rabu (15/11/2023).

Hamid mengatakan untuk menduduki jabatan Eselon I dapat diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bahkan, diberi kesempatan hingga

Eselon II.

"Dibuka seleksi terbuka misalnya untuk jabatan kepala dinas tapi itu belum bisa kita jawab karena diatur dalam PP, PP-nya belum keluar. Didalam undang-undang eselon dua terbuka kesempatan untuk PPPK," tambahnya.

Dia pun mengingatkan kepada seluruh PNS agar segera mempelajari dan beradaptasi pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang terbaru. Dalam undang-undang tersebut TNI/Polri dapat mengisi formasi jabatan yang ada di kementerian lembaga dan ASN dapat mengisi jabatan TNI/Polri.

"Tapi semua itu belum bisa kita simpulkan, belum bisa kita aplikasikan sepanjang PP belum keluar yang lebih teknis karena didalam undang-undang disebut diatur dalam PP," katanya.

Dilanjutkannya, terkait kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN, salah satu yang ditekankan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Seperti berhak mendapat 20 jam pelajaran peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam setahun berubah menjadi wajib mendapatkan pen-

ingkatan kompetensi melalui Diklat, coaching clinic dan sebagainya untuk aparatur sipil negara.

"Dalam undang-undang tersebut lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang selama ini berfungsi mengawasi seleksi aparatur sipil negara, penempatan promosi dan mutasi dalam undang-undang tersebut istilah daripada KASN itu sudah tidak ada. Tetapi kewenangannya dilimpahkan kepada instansi pemerintah lainnya atau sampai pimpinan dibentuk bisa saja nanti di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemendagri) atau di Badan Kepegawaian Negara (BKN)," jelasnya.

Tak hanya itu saja, ditekankan juga untuk ke depannya peningkatan kualitas promosi dan ASN menganut pola karir ada sembilan kolom mulai ketika menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga saat dipromosikan.

Kualifikasi pendidikan atau DNA talent pun akan diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini dilakukan karena melihat fakta lapangan dimana banyak ASN yang memiliki pendidikan yang berbeda namun ahli di bidang tertentu. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



ADE/MKR

Suasana syukuran HUT ke 78 Korps Brimob.

Pesan Kapolda Daniel ke Brimob: Jaga Solidaritas dan Netralitas di Pemilu 2024

TARAKAN - Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Adityajaya berpesan kepada Korps Brimob, yang memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-78, untuk menjaga solidaritas dan netralitas di Pemilu 2024.

Menurutnya, solidaritas tidak hanya dibangun ke internal Polri ataupun Brimob, melainkan juga kepada TNI dan masyarakat umum. Melalui cara tersebut, Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan sukses. Selain itu, dia mengingatkan kepala seluruh personel untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024.

“Solidaritas pertama kemudian netralitas. Solid dengan TNI, bersama komponen masyarakat lainnya bagaimana kita bisa menyukseskan Pemilu 2024 aman, lancar dan sukses,” ucap Daniel saat ditemui usai menghadiri syukuran HUT ke 78 Brimob di Mako Jajaran Satuan Brimob Polda Kaltara, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan, Kamis (16/11/2023).

Netralitas yang dimaksud adalah tidak boleh berpihak kepada kepentingan atau pengaruh pihak manapun, sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014.

Menurut Daniel, Satuan Brimob Polda Kaltara selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Hal ini pun telah diapresiasi oleh masyarakat. Kendati demikian, dia mengingatkan untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

“Di usia ke 78, tentunya semakin dewasa dan apa yang sudah dikerjakan selama ini semoga bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Satuan Brimob Polda Kaltara, Kombes Pol Yohanes Jalung Siram mengatakan jelang Pemilu 2024, pihaknya telah menyiapkan seluruh personel. Selain itu juga menyiapkan kemampuan serta peralatan.

“Dengan adanya kekurangan personel kita maksimalkan dengan peningkatan kemampuan lapangan.

Seperti penanganan bom, dan teroris ada namanya one terror, penanganan rusuh massa itu ada anti anarkis. Kita sudah arahkan penembakan ketika sudah mengarah ke anarkis, perusakan, pembakaran dan penjarahan. Itu kita lakukan penembakan yang melumpuhkan,” katanya.

Dalam kesempatan ini, dia juga berharap di HUT ke 78 Korps Brimob, seluruh personel tetap solid dalam melaksanakan tugas terlebih saat ini yang telah memasuki tahapan pemilu. Harapannya Brimob dapat mengamankan negara Indonesia sesuai dengan tema yang diangkat yakni “Negara Aman Menuju Indonesia Maju”.

“Artinya dalam setiap tugas dapat menjaga Khatimbnas dengan baik sehingga keamanan dan aktivitas perekonomian tetap bisa berjalan,” pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



Kepala Satuan Brimob Polda Kaltara, Kombes Pol Yohanes Jalung Siram.

ADE/MKR

Brimob Polda Kaltara Kekurangan Personel

TARAKAN - Kepala Satuan Brimob Polda Kaltara, Kombes Pol Yohanes Jalung Siram mengatakan masih kekurangan personel untuk Satuan Brigade Mobil (Brimob) dari jumlah idealnya 1700 personel. Saat ini, Brimob Polda Kaltara hanya memiliki kurang lebih 500 personel.

"Kita baru ada 500 personel. Kalau sesuainya personel itu di angka 1.700. Itu idealnya," ucap Kombes Pol Yohanes Jalung Siram di Tarakan, Kamis (16/11/2023)

Kendati personel masih kurang, dia menyebut telah memanagerinya dengan menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya, dengan peningkatan kemampuan para personel. Hal ini dilakukan guna meminimalisir dampak dari kekurangan personel.

"Namun kekurangan yang ada itu, bukan berarti kita underestimate dengan tugas yang dilaksanakan. Kita berupaya semaksimal mungkin manager kekurangan personel

itu dengan peningkatan kemampuan," ungkapnya.

Yohanes menjelaskan ratusan personel yang dimiliki Brimob tersebar di seluruh wilayah Kaltara. Seperti Tarakan, Bulungan, Malinau, Nunukan dan Sebatik. Hanya saja, ada satu wilayah di Kaltara yang belum memiliki personel yakni Kabupaten Tana Tidung (KTT).

"Yang belum ada KTT, karena merupakan kabupaten baru. Kami lagi mencari lahan dan sudah berkoordinasi dengan Kapolres dan Bupati. Namun lahan yang ada belum bisa digunakan sehingga harus cari wilayah lain," paparnya.

Dia menargetkan pada tahun 2025 wilayah KTT telah memiliki personel. Saat ini pihaknya pun tengah berupaya mewujudkan hal tersebut. "Di KTT di tahun 2025 kita targetkan, karena kita masih fokus pada kegiatan Pemilu.

Sedangkan untuk armada, diamen-

gatakan sudah mencukupi termasuk untuk persenjataan serta transportasi para personel. "Sementara armada sudah mencukupi, kalau di bilang kurang semuanya pasti kurang. Tapi seperti persenjataan, perlengkapan, serta transportasi personal sudah cukup memadai," katanya.

Sebagai informasi, pada Kamis (16/11/2023) diperingati HUT Korps Brimob. Untuk peringatan HUT ke 78 Korps Brimob di Kaltara, dirayakan dengan berbagai kegiatan mulai dari pertandingan badminton, lomba burung, dan kegiatan donor darah. Kemudian adapula anjungsana ke pantai asuhan dan purnawirawan. Serta lomba internal yakni squad challenge Brimob dan menembak presisi untuk perwira. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik

PJ GUBERNUR DORONG PERAN MEDIA DALAM PEMERINTAHAN

BACA HALAMAN 2-3



**GAGALKAN PEREDARAN 3 KG
GANJA, SATRESKOBA POLRES
KUKAR TANGKAP 3 ORANG PRIA**

BACA HALAMAN 33



Coffee Morning Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama wartawan di Kaltim, digelar di Pendopo Gubernur Kaltim pada Jumat (17/11/2023).

Silaturahmi dengan Wartawan, Pj Gubernur Akmal Malik Dorong Peran Media dalam Pemerintahan

SAMARINDA - Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menggelar pertemuan silaturahmi dalam acara Coffee Morning bersama awak media. Acara berlangsung di Pendopo Gubernur Kaltim pada Jumat (17/11/2023) pagi ini. Hadir para pemimpin redaksi dari berbagai media online dan media cetak

di Kaltim, termasuk jajaran redaksi Mediakaltim.com. Ikut mendampingi Gubernur Kaltim, Kepala Diskominfo Kaltim HM Faisal.

Dalam sambutannya, Akmal Malik mengatakan bahwa media merupakan mitra pemerintah yang mampu menyediakan informasi tentang seluruh wilayah Kaltim.

“Seluruh wilayah di Kaltim, termasuk Bontang dan Paser, kami berharap media dapat menyediakan informasi yang jujur kepada pemerintah, sehingga kami dapat memahami situasi sebenarnya di wilayah tersebut. Jika memungkinkan, kami akan mengundang wartawan untuk mengunjungi daerah tersebut,” ucapnya.



Pj gubernur tersebut juga menekankan pentingnya peran media dalam mengawasi birokrasi agar pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada. Media menjadi wadah komunikasi yang vital antara masyarakat, media, dan pemerintah, sehingga daerah dapat berkembang menuju arah yang lebih baik.

"Kami akan menjadwalkan pertemuan seperti ini setiap bulan, agar diskusi kami tetap berjalan. Kami

akan menyiapkan topik-topik terkait daerah, sehingga pertemuan ini akan menjadi lebih berarti. Kami akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjadwalkannya," tambahnya.

Selanjutnya, Akmal Malik juga berencana untuk berkoordinasi dengan Panglima Kodam VI/Mulawarman dalam rangka kegiatan safari selama seminggu. Ini dilakukan agar pihaknya dapat melihat langsung kondisi di lapangan.

"Kami akan mengatur jadwalnya satu bulan sekali secara bergantian. Jika tujuan safari tersebut dapat memberikan manfaat bagi media dalam memberikan informasi kepada masyarakat, maka itu akan menjadi pencapaian yang positif," tegas Akmal Malik. (Nta)

Pewartu: Nita
Editor: Agus Susanto



Informasi Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra



Umur Tanaman (Tahun)

Rp Harga TBS (Rp/Kg)

3	1.917,85
4	2.049,33
5	2.058,14
6	2.079,43
7	2.091,39
8	2.107,53
9	2.149,04
>10	2.174,53

Harga CPO

Rp. 10.532,27



Harga Kernel

Rp. 4.747,28

Update : Oktober Periode II (16-31 Oktober 2023)

@disbunkaltim disbud.kaltimprov.go.id

KALTIM BERDAULAT MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

DINAS PERKEBUNAN *Minggu Ke 1*
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR *BULAN:*
November 2023

SIPASBUN
SISTEM INFORMASI PASAR PRODUK PERKEBUNAN UNGGULAN

KOMODITAS	PETANI/ PRODUSEN	PENGECEK/ PENGUMPUL	Indikasi Karet	
Karet	Rp.9.900 /kg K3 50-55%	Rp.12.700/Kilo	Indikasi Karet K3 100%	Rp.22.750/kg
Lada Putih	Rp.55.000 /kg	Rp.97.000 /kg	Indikasi Karet K3 85%	Rp.19.337/kg
Kelapa Tua	Rp.5.700 / hj	Rp.2.200/hj	Indikasi Karet K3 50%	Rp.9.668/kg
Kelapa Muda	Rp.8.700 / hj	Rp.9.500 / hj	TBS Kelapa Sawit Penetapan Harga Provinsi Bagi Pekebun Bermitra Periode II (16 sd 30) bulan Oktober 2023 Berdasarkan Umur Tanaman	
Biji Kakao	Rp.28.000 / kg	Rp.32.000 / kg	Harga TBS Umur >10 Thn Rp.2.174,5/kg Naik Rp.17,8 atau 0,8% dari periode sebelumnya	
Gula Merah Aren	Rp.28.800 / kg	Rp.30.200 kg		

HARGA RATA-RATA KOMODITI PERKEBUNAN KABUPATEN/KOTA

BerAKHLAK

DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INFORMASI HARGA INDIKASI KARET
Tanggal 10 November 2023

Informasi Harga Indikasi Karet Provinsi Kalimantan Timur Berbagai Tingkatan Kadar Karet Kering (K3)

Dasar Perhitungan Harga Indikasi Karet adalah Harga SICOM (Singapore Commodity) Hari ini pada Technically Specified Rubber (TSR20)/ Standard Indonesian Rubber (SIR20)

Harga SICOM hari ini : 147,8 US Cent
Kurs Rupiah Kisaran : RP.15.551
Harga Dasar / FOB : RP.22.984 X 85%
RP.19.536 **TURUN 0,2%**

KONDISI KARET

	Harga / kg
Harga Jalan Pabrikasi K3 100%	Rp. 18.000 - Rp.19.000
HARGA KARET KERING STOK GUDANG 15 HARI LEDIH K3 70% - 76%	Rp. 13.750 - Rp. 14.750
HARGA KARET KERING STOK GUDANG K3 65% - 69%	Rp. 12.800 - Rp. 13.600
HARGA KARET KERING STOK GUDANG TINGKAT PETANI/UPPD K3 60% - 64%	Rp. 11.800 - Rp. 12.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI / UPPD K3 55% - 59%	Rp. 10.800 - Rp. 11.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI K3 50% - 54%	Rp. 9.800 - Rp. 10.600
HARGA KARET BASAH TINGKAT PETANI K3 45% - 49% PANEN 2-3 HARI	Rp. 8.800 - Rp. 9.600
HARGA KARET BASAH TINGKAT PETANI K3 40% - 44% (DARU PANEN)	Rp. 7.800 - Rp. 8.600

BerAKHLAK



Kadisbun Kaltim: Usaha Perkebunan Harus Simetris dengan Prinsip Ekologi dan Kultural

SAMARINDA - Dalam pengelolaan perkebunan berkelanjutan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara teknis dan strategi perencanaan amat diperlukan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Muzakkiir dalam acara yang diprakarsai oleh GAPKI yang bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (24/10/2023).

Pembangunan usaha perkebunan, tambah Muzakkiir, selain untuk memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, juga harus memerhatikan perlindungan lingkungan.

"Perlindungan yang dimaksud yaitu dengan menjaga dan mengelola Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT), yang merupakan lahan memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural," paparnya.

"Alasannya, berbagai nilai ini amat penting, baik di tingkat tapak, daerah, nasional atau global sesuai dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2021," tambah Muzakkiir.

Dia juga bilang bahwa industri perkebunan kelapa sawit dinilai penting terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Oleh sebab itu Pemprov Kaltim berupaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit guna meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh di sektor tersebut.

"Ini dikarenakan sektor kelapa sawit identik dengan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja di semua tingkatan pendidikan," ujarnya.

Tak hanya itu, Muzakkiir juga me-

negaskan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang menyerap biaya cukup besar sehingga perlu upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi.

Menurut Muzakkiir, salah satu cara mengukur efisiensi tenaga kerja adalah dengan menghitung produktivitas kerja, di mana produktivitas kerja merupakan perbandingan antara tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi dalam satuan waktu tertentu.

"Dan saat ini tenaga kerja perkebunan di Kalimantan Timur mencapai 319ribu pada Perkebunan Besar Sawit (PBS), belum termasuk pekerja perkebunan rakyat yang ada," jelasnya.

Muzakkiir membeberkan, kebutuhan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh luas kebun, jenis pekerjaan, topografi dan iklim, teknologi, komposisi/umur tanaman.

"Untuk itu pengelolaan tenaga kerja harus memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengontrolan tenaga kerja penting untuk dilakukan dalam menjamin terlaksananya pekerjaan dengan baik," kata Muzakkiir.

Lebih jauh Muzakkiir menambahkan, pekerjaan dalam pemeliharaan cukup banyak memerlukan biaya dan tenaga, dan merupakan syarat untuk mendapatkan tanaman yang baik. Selain itu, kata dia, kegiatan perkebunan kelapa sawit berfluktuasi sepanjang tahun, karena adanya pekerjaan yang berkaitan dengan musim, lahan, curah hujan, dan bulan panen puncak dan panen rendah.

"Oleh karenanya perlu peningkatan kapasitas tenaga kerja perkebunan agar menghasilkan tenaga kerja yang cermat, efektif dan efisien. Dibatalkan bahwa tenaga kerja itu adalah perangkat lunak yang harus selalu dilakukan upgrade, agar pengelolannya dapat memenuhi kaidah-kaidah yang telah dipersyaratkan," pungkasnya. (ADV)

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Muzakkiir



Dinas Perkebunan Fasilitas Peningkatan SDM Penilai Usaha Perkebunan di Kaltim

BOGOR - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pembangunan perkebunan dalam meningkatkan iklim investasi melalui pengelolaan yang baik.

Salah satunya adalah memfasilitasi Petugas Penilai Usaha Perkebunan atau PUP untuk meningkatkan kapasitas melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) di wilayah Bogor, Jawa Barat, pada 23-28 Oktober 2023, yang saat ini masih dalam pelaksanaan.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Ahmad Muzakkir, mengatakan bahwa di Kaltim saat ini tercatat 303 Perusahaan Perkebunan Besar sebagai sumber devisa negara dari hasil ekspor komoditas sawit/CPO dan sumber bahan baku industri pangan, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat untuk menambah pendapatan.

"Amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan bahwa aspek pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya," papar Muzakkir.

"PUP merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang telah diubah dua kali dengan Permentan Nomor 29 tahun 2016 dan Permentan Nomor 21 tahun 2017," tambahnya.

Muzakkir mengemukakan, penilaian usaha perkebunan tersebut diperuntukkan bagi perusahaan perkebunan sesuai dengan



kewenangannya, memerlukan petugas penilai yang memiliki kapasitas mumpuni dan standar, agar mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan.

"Tahun 2023, Pemprov Kaltim melalui Dinas Perkebunan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) menyelenggarakan pelatihan PUP untuk peserta yang dibiayai APBD sumber dana FCPF dengan jumlah peserta 25 orang dari seluruh kabupaten di Kaltim," ungkapnya.

Tujuan penilaian, kata dia, adalah untuk mengetahui kinerja yang dicapai oleh perusahaan, antara lain aspek teknis, manajemen usaha, dan kepatuhan.

"Pelaksanaan Penilaian usaha perkebunan dilakukan paling kurang 1 tahun sekali untuk perusahaan yang sedang dalam tahap pembangunan baik kebun dan/atau unit pengolahan, dan paling kurang 3 tahun sekali untuk perusahaan yang sudah

operasional," terangnya.

Ahmad Muzakkir lebih lanjut menyatakan bahwa kelompok penilaian hasil dari penilaian usaha perkebunan terdiri dari kelas kebun yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan kinerja usaha perkebunan.

Bagi Perusahaan perkebunan tahap operasional yang memperoleh kelas kebun I (baik sekali), II (baik) atau III (cukup) dapat mengajukan proses sertifikasi ISPO sebagaimana persyaratan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Harapannya agar setelah kembali melaksanakan pendidikan dan pelatihan, para peserta melaksanakan tugas-tugas demi mewujudkan tata kelola perkebunan berkelanjutan di Kaltim dapat kita wujudkan semagaimana tujuan yang telah digariskan dalam Perda Kaltim No 7 tahun 2018 tentang Perkebunan Berkelanjutan," pungkasnya. (ADV)



Penjaringan Berinovasi 2023: SI CALO KEBUN Disbun Kaltim Bersaing di 10 Besar

SAMARINDA - Inovasi Sistem Informasi Calon Petani/Pekebun dan Calon Lahan Perkebunan, atau SI CALO KEBUN, yang dimiliki Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (Disbun Kaltim), masuk dalam nominasi 10 besar Penjaringan Perangkat Daerah Berinovasi Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Tahun 2023, yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim.

Kepala Disbun Kaltim, Ahmad Muzakir, menjelaskan bahwa tim penilai Balitbangda Kaltim telah melakukan penjaringan terhadap inovasi yang dikembangkan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.

Dalam proses penjaringan ini, Muzakir mengungkapkan bahwa telah dipilih 10 OPD yang akan diusulkan sebagai nominasi Perangkat Daerah Berinovasi Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Tahun 2023. "Alhamdulillah, melalui inovasi SI CALO KEBUN, Dinas Perkebunan masuk sebagai salah satu nominasi," ungkapnya di Samarinda, Senin (30/10) siang.

Muzakir menambahkan bahwa OPD yang telah ditetapkan sebagai nominasi sepuluh besar akan mengikuti wawancara di Aula Balitbangda Kaltim pada Senin hingga Selasa (30-31 Oktober 2023) untuk menentukan posisi peringkat 10 besar terbaik.

Selain Disbun Kaltim, ada juga Perangkat Daerah lainnya yang masuk dalam 10 besar nominasi, seperti Badan Pendapatan Daerah dengan inovasi Sadelpost (Samsat Delivery Pos), Geber RT (Gerakan Bersama Rukun Tetangga), E-Wapu

PBBKB (Elektronik Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), E-Pap (Elektronik Pajak Air Permukaan), Biro Organisasi dengan inovasi E-Sakip.

Selain itu, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan masuk dalam 10 besar nominasi melalui inovasi Embah Suka Baper (Eco Enzyme, Mengubah Sampah Organik Rumah Sakit Menjadi Bahan Pembersih), RSJD Atma Husada dengan inovasi Sihati (Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa Terintegrasi), Balitbangda dengan inovasi Sentra KI, dan Dinas Sosial melalui inovasi Kelas Budiman (Keterampilan Lansia Budidaya Ikan dan Tanaman).

Muzakir menjelaskan bahwa SI

CALO KEBUN merupakan inovasi yang diinisiasi pada aksi perubahan PIM IV (PKA) milik Arif Sabtamiharja, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyiapan dan Perluasan Areal pada tahun 2021.

Inovasi ini, lanjut Muzakir, dirancang untuk mempermudah layanan pengajuan proposal permohonan bantuan bibit unggul perkebunan bagi kelompok tani yang membutuhkan dengan mengakses <https://cpclkebun.kaltimprov.go.id>.

"Inovasi ini secara tidak langsung mendukung reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan, yakni menciptakan lapangan pekerjaan melalui kegiatan perluasan tanaman perkebunan," tutup Muzakir. (adv)





Legislator PPP Ini Usulkan Lahan Eks Puskib Jadi Kawasan Pendidikan Terpadu

BALIKPAPAN - Lahan bekas Pusat Kegiatan Islamiyah Balikpapan (Puskib) yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Rencana pembangunan supermall dan apartemen di lahan tersebut melalui kerja sama bisnis Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS) bersama pihak ketiga belum terealisasi meski peletakan batu pertama atau groundbreaking telah dilakukan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek pada tahun 2013.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane mengusulkan agar Pemprov Kaltim menghibahkan aset tersebut kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk dijadikan kawasan pendidikan terpadu. Menurutnya, pembangunan supermall tidak tepat karena akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama beberapa rumah warga yang sempat terkena imbas saat pembongkaran bangunan Puskib.

"Kita minta itu bisa diserahkan ke Balikpapan untuk menjadi kawasan pendidikan terpadu. Lahan sangat luas dan strategis, apalagi di Balikpapan Tengah khususnya tidak punya SMA," kata Mimi akhir pekan lalu.

Mimi juga menyampaikan, kawasan sekitar eks lahan Puskib juga bisa dimanfaatkan membangun fasilitas lain, seperti kantor polsek dan koramil yang selama ini masih menumpang di kecamatan lain. Ia berharap, Pemprov Kaltim segera mengambil keputusan terkait pemanfaatan lahan Puskib itu.

"Tentu hal ini akan disampaikan kepada pemerintah provinsi, karena bagaimanapun pemanfaatan aset daerah untuk kemaslahatan mas-



Anggota Komisi III DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane

yarakat," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, pihaknya sedang mengevaluasi rencana kerja sama bisnis antara Perusda MBS dan pihak ketiga terkait pembangunan supermall dan apartemen di lahan Puskib. Ia mengaku, belum ada keputusan final terkait hal tersebut.

"Kita lihat PT MBS secara verbal akan memutuskan. Setelah tahun lalu tidak jadi. Kita juga butuh kejelasan. Lanjut tidak, stop tidak, akhirnya

hanya mangkrak begitu saja," kata Akmal saat meninjau lokasi Puskib, Kamis (9/11/2023).

Lokasi bekas Puskib memang tidak ada pergerakan dan menjadi kawasan tak berpenghuni. Padahal, lahan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan yang bermanfaat bagi masyarakat Balikpapan dan Kaltim. ([eky/adv/dprdkaltim](#))

*Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari*

Jahidin: Harus Bahu Membahu Tekan Kerawanan Pemilu 2024

SAMARINDA - Pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia. Pemilu 2024 akan menentukan siapa yang akan memimpin bangsa dan daerah ini untuk lima tahun ke depan. Pemilu 2024 juga akan menjadi ajang untuk mengukur kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai politik yang berkompetisi.

Namun, Menurut Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin, Pemilu 2024 juga berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat dan kelompok. Konflik dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti isu-isu yang berkaitan dengan SARA, hoaks, money politik, dan dinamika politik lokal. Konflik dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengancam stabilitas dan keamanan nasional.

"Untuk itu, kita semua harus bahu membahu menekan kerawanan Pemilu 2024 di tiap daerah, terutama di Kaltim," jelasnya kepada media ini.

Politisi PKB ini menyebut, semua elemen masyarakat Kaltim harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menciptakan suasana Pemilu 2024 yang damai, aman, dan demokratis. Elemen masyarakat meliputi pemerintah, legislatif, partai politik, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, aparat keamanan, media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan masyarakat luas.

"Masyarakat harus memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan daerah, bukan berdasarkan iming-iming uang, primordialisme, atau emosional. Dan juga harus menjaga persaudaraan dan kebersamaan sebagai warga negara Indonesia, serta menghormati pilihan dan hak suara masing-masing," ungkapnya.

Ia menerangkan, pemerintah dan legislatif harus bertanggung jawab untuk mengelola aset daerah dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Pemerintah dan legislatif juga harus memberikan contoh yang baik dalam berpolitik dan berdemokrasi, serta tidak melakukan intervensi atau tekanan terhadap penyelenggara dan pengawas pemilu.

Sementara itu, partai politik sebutnya, harus mengedepankan visi, misi, dan program yang pro-rakyat dan pro-kepentingan daerah dalam kampanye Pemilu 2024. Partai politik juga harus menjunjung tinggi etika dan moral politik, serta tidak melakukan praktik money politics, politik identitas, dan politik adu domba yang dapat merusak kualitas demokrasi dan mengorbankan hak-hak rakyat.

Adapun Penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), harus bekerja secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. KPU harus menjamin hak pilih dan hak dipilih setiap warga negara, serta menghasilkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

Sementara Pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus bekerja secara objektif, kritis, dan tegas dalam mengawasi Pemilu 2024. Bawaslu harus menegakkan aturan dan hukum yang berlaku, serta

menindak segala bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dapat merugikan peserta dan pemilih.

Jahidin juga menilai aparat keamanan, yaitu kepolisian dan TNI, harus bekerja secara netral, profesional, dan proporsional dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu 2024. Aparat keamanan harus melindungi hak-hak dan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024, serta mencegah dan menangani segala bentuk gangguan dan konflik yang dapat mengancam stabilitas dan kondusifitas Pemilu 2024.

Tak luput, Jahidin menganggap media massa harus bekerja secara berimbang, akurat, dan bertanggung jawab dalam memberitakan Pemilu 2024. Media massa harus menjadi sumber informasi yang edukatif dan kredibel bagi masyarakat, serta menjadi sarana komunikasi yang konstruktif dan dialogis antara peserta dan pemilih.

Tak luput, menurutnya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi harus bekerja secara aktif, kreatif, dan inovatif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang Pemilu 2024 kepada masyarakat. Mereka juga harus menjadi perekat dan penyejuk bagi masyarakat yang terpolarisasi oleh isu-isu yang berkaitan dengan SARA, hoaks, dan ujaran kebencian.

"Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas dan stabilitas politik di Kaltim, terutama menjelang Pemilu 2024. Mari kita bersama-sama menciptakan Pemilu 2024 yang damai, aman, dan demokratis di Kaltim. Mari kita bersama-sama membangun Kaltim yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing," pungkasnya. **(Eky/Adv/DPRDKaltim)**

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Jahidin, Anggota Komisi I DPRD Kaltim



Salehuddin

Legislator ini Usulkan Jalan Negara di Kaltim Dialihkan ke Provinsi, Terkait Percepatan Perbaikan

SAMARINDA - Untuk percepatan pembangunan dan perbaikan jalan yang berstatus jalan negara di Kalimantan Timur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Salehuddin berharap statusnya diserahkan ke provinsi Kaltim.

Salehuddin mengatakan hingga saat ini perbaikan jalan negara yang menjadi jalan utama harus menunggu anggaran dari program pemerintah pusat. Padahal kondisi ruas jalan sudah banyak yang rusak dan berlubang.

Menurut Salehuddin Pasilitas, kondisi jalan yang bagus sangat penting sebagai penunjang ekonomi, mobilitas barang dan transportasi masyarakat, jika akses jalan rusak dan berlubang maka pastinya akan mengganggu kehidupan masyarakat.

"Tentunya kita prihatin ya, contohnya jalan dari Samarinda menuju Sendawar atau Kutai Barat, di

beberapa titik masih banyak jalan yang rusak. Tentu ini mengganggu dan memperlambat perkembangan pembangunan," ujar Anggota DPRD asal Kukar ini.

Untuk mengatasi masalah ini, Salehuddin berpendapat bahwa pemindahan pengelolaan jalan negara ke provinsi dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan memiliki kendali penuh atas pengelolaan jalan, pemerintah provinsi dapat lebih responsif dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan yang rusak.

"Coba jalan itu diserahkan ke provinsi maka kita nggak harus menunggu pusat lagi. Bisa kita surakan di provinsi penganggarnya, saya rasa perbaikannya akan lebih cepat karena memangkas jalur administrasi yang jauh ke pusat," jelasnya.

Selain itu, Salehuddin juga mengungkapkan harapannya bahwa dengan adanya pemindahan pen-

gelolaan, pemerintah provinsi dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pembangunan dan perbaikan jalan.

"Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kalimantan Timur," imbuhnya.

Salehuddin berharap agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan usulan ini dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kondisi jalan di Kalimantan Timur.

"Saya meyakini bahwa dengan kerjasama yang baik, pembangunan jalan yang lebih baik dan kondisi jalan yang lebih baik dapat terwujud," tutup Salehuddin. (Adv/DPRDKaltim/Han)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir

DPRD Kaltim Dukung Pembangunan Jalan Akses Baru di Samarinda

SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, menyatakan dukungannya terhadap proyek pembangunan jalan akses baru dari Jalan Letjend S. Parman ke Jalan KH. Samanhudi yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Proyek tersebut bertujuan untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di Jalan Gatot Subroto, Samarinda.

"Kami mengapresiasi proyek tersebut sebagai inisiatif Pemprov Kaltim untuk mengurai kemacetan di Samarinda yang penduduknya kian padat," ujar Sutomo.

Menurut Sutomo, proyek jalan akses baru tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Samarinda, terutama yang tinggal atau beraktivitas di kawasan tersebut. Ia berharap

proyek tersebut dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami meminta proyek tersebut dilaksanakan sebaik-baiknya untuk membuahkan hasil yang optimal. Hal itu untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak merugikan pihak lain," katanya.

Sutomo juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proyek tersebut agar berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Ia juga berharap tidak ada kendala dalam proses pembangunannya, baik dari segi teknis maupun sosial.

"DPRD Kaltim akan mengawasi dan mendukung program pemerintah daerah. Kami juga berharap tidak

ada kendala dalam proses pembangunannya, baik dari segi teknis maupun sosial," tuturnya.

Selain itu, Sutomo juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membahas beberapa proyek pembangunan lainnya di Kaltim bersama Dinas PUPR provinsi. Ia meminta agar Dinas PUPR Kaltim mengoptimalkan program kerja pada tahun 2024 yang sudah direncanakan dan tetap menjaga mutu pembangunan.

"Jangan sampai proyek pembangunan dikerjakan tanpa kontrol standar kelayakan, yang berdampak pada kerugian bagi masyarakat," pungkasnya. **(Eky/Adv/DPRDKaltim)**

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



Warga di Kelurahan Loa Tebu Masih Ada yang Kesulitan Air Bersih

TENGGARONG - Tidak hanya jaringan listrik saja yang dikeluhkan dan disampaikan masyarakat Kelurahan Loa Tebu, kepada Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Siswo Cahyono. Kebutuhan dasar air bersih untuk minum pun menjadi poin penting yang ditangkap oleh Siswo, saat menggelar reses di Kecamatan Tenggarong, belum lama ini.

Beberapa lokasi di Kelurahan Loa Tebu, masih ditemukan lokasi pemukiman warga yang belum tersentuh jaringan perpipaan air bersih. Sehingga masyarakat di sana belum bisa menikmati air bersih yang berada dari PDAM.

"Masalah jaringan perpipaan yang belum sampe ke sana, instalasi air bersih belum ke sana," ujar Siswo Cahyono, pada mediakaltim.com, Kamis (16/11/2023).

Ini menjadi salah satu program yang didorong oleh orang nomor dua di DPRD Kukar tersebut. Bagaimana memastikan masyarakat di Kelurahan Loa Tebu yang kini belum merasakan nikmatnya air bersih dari PDAM, bisa segera merasakan. Karena memang menjadi hal mereka merasakan kebutuhan dasar tersebut. "Ya ke depan tidak ada krisis air di Kukar. Sementara yang ada mereka pakai sumur bor, memanfaatkan di sungai-sungai kecil," tutup Siswo. (adv)



ISTIMEWA

Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono.

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari

Gelar Reses, Wakil Ketua Siswo : Infrastruktur dan Listrik Paling Banyak Dikeluhkan Masyarakat

TENGGARONG - Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Siswo Cahyono, belum lama ini menggelar reses di beberapa titik di Kecamatan Tenggarong. Sejumlah permasalahan pun didapatinya dan disampaikan oleh masyarakat dan konstituennya.

Terutama di Desa Bendang Raya dan Kelurahan Loa Tebu. Masyarakat di sana mengeluhkan masih ada kawasan-kawasan yang belum teraliri listrik. Padahal desa ini berada Kecamatan Tenggarong di Ibu Kota Kabupaten Kukar.

Ironisnya lagi, listrik seharusnya sudah menjadi kebutuhan dasar yang patut dipenuhi pemerintah kepada masyarakatnya. "Kalau berbicara dengan PLN, (alasan) anggaran tidak ada," ujar Siswo pada mediakaltim.com, Kamis (16/11/2023).

Oleh karenanya, perlu ada peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Seperti upaya melakukan sharing anggaran bersama PLN sebagai produsen kebutuhan listrik. Seperti Pemkab Kukar yang menyiapkan sarana

infrastrukturnya, sementara PLN yang menyiapkan jaringannya. Terbukti dengan langkah tersebut, sudah ada beberapa daerah yang teraliri listrik.

"Insya Allah tahun ini semua daerah sudah dipastikan teraliri listrik," lanjutnya.

Tidak hanya itu, masalah infrastruktur pun menjadi hal yang disampaikan oleh warga. Seperti permohonan peningkatan kapasitas jalan pada gang-gang kecil akses milik warga. Sebut saja seperti di Desa Rapak Lambur dan Loa Tebu, yang memang memerlukan adanya semenisasi.

Juga masalah yang berkaitan dengan sektor pertanian di Tenggarong. Di mana Pemkab Kukar yang mencanangkan Kukar sebagai daerah lumbung pangan bagi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Seperti melalui penyediaan alsintan, seperti hand traktor dan zonder, termasuk mesin lain-lainnya," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU, Irawan Heru Suryanto.

Komisi I DPRD PPU Apresiasi Suksesnya Pilkades Serentak 2023, Cakades Tidak Terpilih Diminta Tetap Berkontribusi

PPU - Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mengapresiasi lancarnya penyelenggaraan Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 14 desa di PPU. Kemudian mendorong para kades terpilih nantinya dapat menjabat sesuai dengan aturan dan mendukung kemajuan pembangunan daerah.

Pilkades Serentak PPU 2023 telah berlangsung sukses, Minggu, 29 Oktober 2023 lalu. Hasil pemilihan tersebut telah menentukan siapa yang akan memimpin masing-masing desa, tetapi ada juga calon kades (cakades) yang harus menerima kenyataan karena tidak terpilih.

"Kami ucapkan selamat ke pada kades terpilih dan percaya mereka akan membawa perubahan positif, kemajuan, dan kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi I PPU, Irawan Heru Suryanto, Kamis (16/11/2023).

Diketahui pada pemilihan kepala desa serentak ini diikuti oleh 14 desa yang ada di Kabupaten PPU dinyatakan 11 diantaranya merupakan incumbent/petahanan. Namun semuanya dinyatakan tumbang atau gagal menjabat lagi sebagai kepala desa karena raihan suara memilih.

Untuk itu, Irawan memberikan pesan khusus kepada cakades baik yang tidak terpilih dalam pesta demokrasi ini. Menurutnya, majunya mereka dalam kontestasi politik sudah harus siap untuk menerima hasil akhirnya.

"Jangan berkecil hati. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kami menghargai usaha keras dari semua calon kepala desa yang telah berpartisipasi dalam pemilihan ini. Pilkades adalah bagian dari demokrasi, dan keberhasilan atau kegagalan adalah hal yang biasa dalam kontestasi politik," jelasnya.

Ia menambahkan, kegagalan dalam pemilihan tidak boleh menjadi akhir dari perjalanan politik cakades. Sebaliknya, kesuksesan dalam kepemimpinan desa dapat dicapai dengan berbagai cara, bukan hanya melalui pemilihan.

"Cakades yang tidak terpilih masih memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat desanya," sambung Irawan.

Selain itu, pentingnya berpikir jauh ke depan dan terus bekerja untuk kesejahteraan desa tanpa harus terpaku pada hasil pemilihan. Tentunya dorongan ini diberikan untuk memotivasi cakades yang tidak terpilih untuk tetap berjuang dan berkontribusi pada masyarakat desa.

"Kita semua ingin yang terbaik untuk Kabupaten PPU, dan itu bukan hanya tanggung jawab cakades terpilih, tetapi juga seluruh elemen yang ada di desa," pungkasnya. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor saat ditemui di ruangkerjanya.

DPRD PPU Dorong Pemkab Hapus Fasilitas Kendaraan Dinas untuk Pejabat

PPU - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendorong Pemkab PPU untuk menerapkan kebijakan baru pada penggunaan fasilitas mobil dinas. Merubah mekanisme penganggaran untuk mengefisienkan demi meningkatkan pembangunan di sektor prioritas.

Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor mengatakan pemberian kendaraan operasional bagi para PNS di lingkup Pemkab PPU dinilai kini kurang tepat. Ia menyarankan agar kendaraan-kendaraan dinas itu ditarik, kemudian menggantinya dengan tunjangan operasional untuk pejabat penerima fasilitas.

"Mobil dinas itu harusnya ditarik dan diganti dengan tunjangan operasional saja untuk pejabatnya," ucapnya, Rabu (15/11/2023).

Syahrudin menuturkan hal itu juga sudah disampaikan secara langsung

kepada Pj Bupati PPU Makmur Marbun. Pun dalam kesempatan terbuka, forum Coffee Morning bersama Pj Bupati PPU dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan alasannya karena kebijakan yang saat ini masih diterapkan itu terlalu membebani APBD. Faktor itu di antaranya yaitu penghitungan BBM dan suku cadang kendaraan tersebut yang tidak sedikit ke depannya.

"Ya kita berhitung pakai mobil dinas, pertama BBM, perawatan onderdil, itu besar. Belum lagi untuk mobil-mobil lama, yang memang butuh peremajaan," paparnya.

Maka dari itu, lanjutnya, mengganti mekanisme dengan tunjangan transportasi dinilai lebih efektif untuk melakukan penghematan. Sebab, itu juga dapat mendorong pegawai/pe-

jabat dapat membeli sendiri kendaraan probadinya, atau bahkan menggunakan transportasi umum.

"Diberi uang transport saja. Lebih jelas dan lebih gampang dikontrol. Lebih hemat, efisien dan tidak teralu membebani APBD. Belum lagi tunjangan itu dapat berputar juga di masyarakat," jelas Syahrudin.

Lebih lanjut, usulan ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam penerapan kebijakan yang bisa diterapkan. Menjadi solusi untuk Pemkab PPU dalam menentukan program prioritas yang membutuhkan anggaran pemerintah.

"Tunjangan diberikan dalam bentuk uang yang jumlahnya bervariasi sesuai tingkat jabatan. Lalu, mobil dinas yang ditarik juga bisa dilelang, dan masuk kas daerah. Semoga rencana itu bisa disetujui," tutupnya. (ADV/SBK)



ROBBI/MEDIAKALTMGROUP

Anggota Komisi III DPRD PPU, Zainal Arifin.

Zainal Optimis Pembangunan Infrastruktur IKN Selesai Tepat Waktu

PPU - Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Zainal Arifin optimis pembangunan tahap pertama Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat terwujud sesuai target Presiden Jokowi. Seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur pendukungnya yang terus digenjut.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) optimistis pembangunan Istana Kepresidenan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN akan selesai pada 2024. Jokowi pun menargetkan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 dapat digelar di kawasan tersebut setelah proses

pembangunannya selesai.

"Pembangunannya saat ini kalau dilihat masif, karena target presiden upacara HUT RI tahun depan di IKN Nusantara," katanya, Rabu (15/11/2023).

Ketua Fraksi Gabungan ini juga menilai tidak lama lagi akan dimulai sejumlah pembangunan untuk gedung kementerian. Zainal mengingatkan Badan Otorita IKN, agar pembangunan IKN ini tidak menimbulkan permasalahan, seperti pembayaran upah para pekerja.

"Selama ini saya masih mendapat informasi bila ada pekerja di IKN Nusantara yang belum mendapatkan

gaji sesuai dengan aturan. Semoga itu tidak terjadi," bebarnya.

Lebih lanjut, mengenai kedatangan ribuan pekerja, menurutnya itu tak menjadi masalah. Karena itu sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan IKN.

Namun ia tetap berharap itu tidak menimbulkan masalah sosial. Dengan melakukan penyerapan tenaga kerja lokal yang cukup. Serta penambahan kegiatan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM). "Ya, sesuai kebutuhan. Tapi yang sudah ikut pelatihan, itu harus diserap," pungkas Zainal. (ADV/SBK)



DWI

Kunjungan Komisi III terkait longsor di Lembah, Bontang.

Amir Tosina Minta Perhatian Pemkot Terkait Rumah Kumuh Kawasan Lembah Berbas Tengah

BONTANG - Rombongan Anggota Komisi III DPRD Bontang melakukan peninjauan terkait lokasi longsor yang terdapat di daerah Lembah, RT 53, Berbas Tengah. Selasa (14/11/2023) kemarin. Di dekat lokasi longsor ada sebuah bangunan rumah warga yang sangat tidak layak menjadi perhatian.

Amir Tosina meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) segera bertindak supaya tidak ada kejadian atau hal yang sangat tidak diinginkan.

Sidak kali ini juga menghadirkan pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang (Perkim) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan (Bapalitbang).

“Lahan yang menjadi tempat longsor tersebut digunakan warga yang kurang mampu untuk membangun rumah. Maka dari itu, semua dihadirkan bersama, untuk memberikan tindak lanjut sebagai solusi longsor ini,” ungkapnya.

Untuk perencanaan tindak lanjut, akan mengkoordinasikan dengan pihak Berbas Tengah. Karenanya, pihak kelurahan diminta untuk bisa menganggarkan dana untuk rumah bagi warga yang tinggal di kawasan longsor tersebut.

“Karena mereka tidak mampu memberikan landasan pada rumah mereka atau melakukan penurapan, jadi mereka asal membangun saja,” ujarnya.

Terlihat celah-celah longsor di bagian rumah warga sekitar. Amir ingin hal ini diberikan perhatian baik dari pihak Pemerintah Bontang bersama DPRD Bontang. Dirinya berharap pemerintah dapat membantu warganya yang tergolong miskin untuk memenuhi kebutuhan papannya yang lebih baik.

“Nanti kami akan usulkan di Musrenbang selanjutnya atau rapat-rapat khusus di DPRD bahwa warga Berbas Tengah butuh bantuan,” tutupnya. (dwi/adv).

Pewarta : Dwi
Editor : Nicha Ratnasari



DWI

Komisi III DPRD Bontang saat sidak di Perumahan Griya Bontang Kuala.

Titik Terang Fasum dan Fasos di Griya Wisata Bontang Kuala

BONTANG - Komisi III DPRD Kota Bontang kembali melakukan sidak di Perumahan Griya Wisata Bontang Kuala untuk yang kesekian kalinya, pada Selasa (14/11/2023).

Hal ini guna untuk membantu menangani permasalahan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) yang tidak terpenuhi dan menjadi masalah utama bagi masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina menjelaskan, sidak kali ini sudah memiliki titik terang dari permasalahan. Sebab, developer (pengembang) dengan itikad baiknya mau menyerahkan ke Pemerintah Kota Bontang.

"Sidak untuk memperjelas segalanya dari pihak warga, developer, lurah,

camat, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang untuk lahan mana saja yang akan dihibahkan," paparnya.

Terkait sertifikat lahan musalayang diberikan hanya sebagian sebelumnya, kini telah diberikan sepenuhnya. Bahkan ada penambahan 5 meter di bagian kanan kiri.

"Untuk selanjutnya, kami kembalikan ke lurah atau camat bersama warga dan developer untuk menyelesaikan sendiri jika timbul permasalahan lagi," ucapnya

Namun, Atos--sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi jalannya penghibahan lahan tersebut.

"Kami berharapnya kedua belah pihak bisa terus sejalan dengan adan-

ya hibah lahan ini. Jadi tidak ada perselisihan lagi nantinya," paparnya.

Selain itu, Atos berharap tidak ada lagi omongan buruk warga ke pihak DPRD Bontang yang mengatakan bahwa pihaknya tidak bekerja dikarenakan tidak bisa memberikan keputusan di mediasi dan sidak sebelumnya.

"Karena tugas kami hanya memberikan bantuan berupa mediasi, bukan pemberi keputusan. Karena permasalahan ini bersifat bisnis, jadi bukan ranah kami," tutupnya. (dwi/adv)

Pewarta : Dwi

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto

Minta OPD Terkait Perhatikan Kualitas Ikan Hasil Tangkapan Nelayan

TANJUNG REDEB - Kualitas ikan hasil tangkapan dinilai Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto sangat penting untuk diperhatikan. Maka dari itu, dirinya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memperhatikan hal tersebut.

Dia menerangkan, kualitas ikan hasil tangkapan perlu diperhatikan karena sebagai bentuk tindak lanjut gebrakan pemerintah pusat ke tingkat kabupaten/kota agar mengadakan kampanye gemar makan ikan sebagai upaya pencegahan dini stunting.

"Kami meminta dinas perikanan juga memperhatikan kualitas bahan baku ikan segar dari tangkapan nelayan," ucapnya.

Dirinya membeberkan, rerata hasil ikan laut segar dari daerah pesisir

selatan Kabupaten Berau dijual ke luar kota. "Rata-rata 70 persen ikan segar dari Berau dijual ke Bontang, Sangata, Samarinda dan Balikpapan," ungkapnya.

Politikus Golkar ini menilai, ikan laut segar banyak dijual ke luar kota karena harga pasaran yang lebih terjangkau. "Bisa juga karena harga jual di sana lebih baik, info ini saya dapat langsung dari nelayan," katanya.

Agar ke depan ikan laut segar tidak lagi diperjualbelikan ke luar kota, Subroto meminta OPD terkait melakukan survei pasar. "Tujuannya adalah agar seluruh harga ikan yang dijual sama, meski tidak tinggi, tetapi harganya sama dengan luar daerah," imbuhnya.

Dengan demikian, kebutuhan ikan segar di Kabupaten Berau bisa selalu

terpenuhi untuk konsumsi anak-anak maupun masyarakat umum.

"Dan jangan sampai program kita tidak satu arah. Satu arah maksudnya pemerintah menggebu-gebu ajak anak sekolah gemar makan ikan, tetapi kenyataannya hasil nelayan ini tidak bisa di backup dari pemerintah," tuturnya.

Dirinya sangat menyayangkan ikan dengan kualitas terbaik bisa saja ke depan bakal laku terjual di luar kota.

"Contoh ikan putih, ikan merah yang bisa dikatakan lari keluar kota. Kita dikatakan cuma bisa mendapatkan mutunya kurang. Jadi ini harus ada sinergi antara Pemkab dan Dinas Perikanan," pungkasnya. (adv/dez)

Persoalan Penguasaan Tanah Negara Merupakan Isu Lama

TANJUNG REDEB - Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah negara

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, persoalan penguasaan tanah negara tersebut merupakan isu lama dan baru muncul saat ini. "Permasalahannya, baik itu masalah tanah dengan masyarakat maupun masyarakat bersama perusahaan," ungkapnya.

Dia menilai, untuk mengurai permasalahan penguasaan tanah negara tersebut cukup rumit. Sebab semua penguasaan tanah memiliki aturan. "Bahkan dari beberapa tempat lainnya, sebagian punya tanah dan yang lainnya punya tempat," jelasnya.

Karena disebutkannya memang ada beberapa indikasi surat tanah hanya asal dibuat tanpa melihat isi maksud tujuan. "Sehingga permasalahan-permasalahan harus segera diurai, dan diselesaikan," ujarnya.

Alhasil pihaknya meminta perlu ada ketegasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta harus mulai dari bawah. "Mulai dari tingkat kepala kampungnya dan dari pihak BPN-nya," terangnya.

Termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurutnya harus berkoordinasi dengan instansi terkait. "Yaitu mulai dari tingkat RT, kampung sampai ke BPN. Sebab beberapa yang kita tanya itu malah seolah-olah berjalan sendiri. Kita inginkan ada kolaborasi supaya masalah tanah bisa clear," tandasnya. (adv/dez)



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

Marak Calo dalam Pengurusan KTP, Minta Pengawasan Berkala

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung menyoroti maraknya pencaloan dalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurutnya, harus ada pengawasan berkala dalam persoalan tersebut. Dia menegaskan, pengawasan harus dilakukan terus menerus. Pasalnya, pengurusan KTP berkaitan dengan pelayanan publik.

"Pencaloan harus dihapuskan, agar kepengurusan berkas masyarakat bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada," ungkapnya.

Dirinya menilai, pencaloan sangat sulit untuk dilepaskan, karena masyarakat ingin seluruh urusan mengenai berkasnya selesai dalam waktu yang singkat. "Tetapi agar tidak semakin marak, pihak OPD terkait harus selektif. Jika sifatnya calo, sebaiknya tidak dilayani. Namun, jika ingin membantu orang, tidak masalah," katanya.

Namun, dengan sistem online yang telah dikeluarkan Disdukcapil Berau, lanjut Nurung, segala pengurusan akan lebih mudah. "Tapi untuk sistem online ini, cara penggunaannya harus terus disosialisasikan, terutama untuk warga di kampung-kampung. Karena kalau warga yang dari kampung biasanya kurang mengerti sistem online," ujarnya.

Selain itu, Politikus NasDem ini juga mengimbau agar Disdukcapil memprioritaskan masyarakat yang sangat memerlukan tanda kependudukan, khususnya bagi mereka yang jauh dari pusat ibukota Tanjung Redeb. "Masyarakat jangan dipersulit, karena selaku warga negara dan berdomisili di tempat itu, maka berhak untuk mendapatkan identitas. Jadi saya berharap pelayanan Disdukcapil ke depannya bisa lebih baik lagi dan jauh dari calo," tutupnya. (adv/dez)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung

Sambut Baik Rencana Pembangunan Depo Kearsipan Dokumen yang Baru

TANJUNG REDEB - Adanya rencana pembangunan depo kearsipan dokumen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pada 2024 mendatang direpons positif jajaran legislatif.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriasyah mengungkapkan, kondisi Kantor Arsip dan Dokumentasi saat ini tidak memungkinkan menyimpan banyaknya berkas yang kian membludak. "Menurut saya tidak masalah tambah depo arsip baru. Yang penting mereka segera menganggarkan ke Bapelitbang," ungkapnya.

Dia mengaku sangat mendukung pengadaan depo arsip Dispusip Berau. "Apalagi anggaran APBD kita tahun depan sangat besar yaitu mencapai Rp 5 triliun. Sehingga menurut saya tidak masalah itu," ujarnya.

Politikus Hanura itu mengimbau agar Kadispusip Yudha Budisantoso

untuk terus mem-follow up Bupati Berau, Sri Juniarsih. "Jangan ke PUPR, karena mereka pelaksana saja. Nanti yang merencanakan Bapelitbang dan Dispusip harus langsung minta arahan dari Bupati," bebernya.

Pasalnya jika Bapelitbang dan Bupati Berau menyetujui pengadaan gedung depo arsip baru tersebut dapat dipastikan kebutuhan tempat berkas setiap opd terkait bisa terpenuhi. "Kalau Bupati menyetujui lalu Bapelitbang yang merencanakan sepakat maka dapat dipastikan kebutuhan depo bisa terpenuhi," imbuhnya.

Sebab kata dia peran DPRD yaitu persoalan tambah gedung depo arsip baru sangat setuju. "Karena kami di sini hanya berperan menyetujui anggaran dengan tepat guna, ke depannya bisa berfungsi maksimal depo baru tersebut," pungkasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriasyah

Pelaku Bisnis Properti, Perhatikan Izin PBG



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina

TANJUNG REDEB - Beberapa bulan terakhir, pembangunan perumahan di Berau tampak menjamur. Sehingga, kegiatan bisnis properti yang mengelola aset berupa tanah dan bangunan disorot Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Ia menegaskan, pebisnis properti harus memperhatikan izin mendirikan bangunan, atau yang saat ini dikenal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). "Saya imbau untuk memperhatikan izin mendirikan bangunan rumah karena itu ada undang-undangnya," ungkapnya.

Dirinya mendorong pihak developer properti memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pembangunan rumah.

Namun, Elita meyakini developer lahan atau pengembangan properti bangunan rumah sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. "Itu harapan kami. Kita juga berharap dari pemerintah daerah dan OPD terkait juga melakukan pengawasan dengan adanya pembangunan perumahan," ucapnya.

Tujuan pengawasan tersebut, lanjutnya, agar tidak menciptakan kondisi pemukiman yang kumuh. "Sehingga kami berharap para developer properti untuk saling bersinergi mewujudkan penataan ruang perumahan yang rapi serta bebas banjir," ujarnya.

Kendati demikian, Politikus Golkar ini menilai, inovasi Pemkab Berau pada saat ini mengenai adanya bisnis properti menjadi ladang pemenuhan tenaga kerja lokal di Bumi Batiwakkal.

"Kita juga tidak bisa menghalang inovasi kinerja Pemkab Berau yang sedang berlangsung, karena itu juga berdampak multiplier efek untuk pemberdayaan tenaga kerja lokal," pungkasnya. (adv/dez)



GK Grand Kartika
HOTEL

COOL NOVEMBER

Deluxe Room Only

Rp 488rb

nett/night

GRATIS WELCOME VOUCHER

Breakfast
2 pax



FREE

Laundry
Up To 2 pcs



FREE

Kopi Inspirasi
Buy 3, Pay 2



FREE

**Afternoon
Tea**



FREE

Ice Cream



→ BOOK NOW

0811 581 3669

www.hotelgrandkartika.com



IST

Pelayanan di MPP Bontang.

Hari Sabtu, DPMPTSP Tetap Buka Pelayanan di MPP

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menggunakan akhir pekan lebih produktif, sekaligus sebagai upaya meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pelayanan dibuka di hari Sabtu, karena ada sebagian masyarakat yang memiliki kesibukan di hari kerja. Adapun jenis perizinan yang dilayani antara lain untuk pendaftaran online, pelayanan informasi, konsultasi pe-

layan Online single submission (OSS), pengambilan dan perpanjangan izin.

Kepala DPMPTSP, Asdar Ibrahim mengatakan pelayanan hari Sabtu di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di lantai 4 Pasar Tamrin sudah dimulai sejak Oktober 2021 lalu dan masih tetap aktif hingga kini. "Pelayanan ini kita buka mulai dari punjl 08.00 hingga 11.30 Wita," ungkapnya saat ditemui, Kamis (16/11/23).

Ia mengungkapkan walaupun

MPP sudah tidak seramai sebelumnya, tapi ia bertekad memberikan pelayanan terbaik dan tetap buka walaupun hari libur.

"Di hari Sabtu ada dua yang buka, Disnaker sama PTSP, karena kebetulan kita sering di cari warga untuk ngurus ini itu," tutupnya. **(Sya/adv)**

Pewarta : Syakurah

Editor : Nicha Ratnasari





ISTIMEWA

Kegiatan pertemuan koordinasi dan sosialisasi perizinan berusaha bidang ketahanan pangan.

DPMPTSP Berikan Edukasi Perizinan dalam Bidang Ketahanan Pangan

BONTANG-Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pertemuan koordinasi dan sosialisasi perizinan berusaha bidang ketahanan pangan, Kamis (16/11/23).

Ketahanan pangan merupakan salah satu ilmu untuk para pelaku usaha dalam menjalan usaha di bidang kuliner. Oleh sebab itu agar para pengusaha memiliki legalitas mereka harus memiliki izin yang sah.

Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan menjelaskan bahwa dengan memiliki izin berusaha, usaha mereka akan memiliki kekuatan hukum.

"Kita jelaskan semua keuntungan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), apa saja yang dibutuhkan dan lain-lain," jelasnya.

Kepengurusan NIB juga dinilai sangat mudah, praktis dan tidak

memakan banyak waktu. Bisa dengan datang langsung ke kantor DPMPTSP atau melalui Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

"Tata cara pendaftaran hak akses dan penerbitan NIB dan UMK kita jelaskan semua," tutupnya. **(Sya/adv)**

Pewarta : Syakurah
Editor : Nicha Ratnasari



SYAKURAH/RADARBONTANG

ilustrai pelayan

DPMPTSP Bontang Buka Pola Pelayanan di 7 Kelurahan

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menyiapkan Pojok Layanan (Pola PTSP) di kelurahan-kelurahan.

Kepala DPMPTSP, Asdar Ibrahim mengatakan dalam mengembangkan pelayanan pihaknya menyediakan konter pelayanan perizinan di 7 kelurahan. Yakni, Kelurahan Guntung, Loktuan, Berbas Pantai, Berbas Tengah, Kanaan, Bontang Lestari, dan Gunung Telihan.

“Saat ini kami masih menasar 7 kelurahan. Sementara kalau kelurahan yang lain itu kan masih dekat dengan kantor DPMPTSP,” katanya saat ditemui, Kamis (16/11/23).

Dijelaskan, petugas pelayanan perizinan menggunakan pegawai kelurahan setempat yang telah dibekali informasi terkait pengajuan permohonan perizinan, yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Pelayanan di kelurahan paling banyak NIB. Karena mudah juga kan

untuk berkasnya hanya perlu KTP dan nomor HP,” jelasnya.

Adapun sarana dan prasarana Pola PTSP seperti komputer, printer, dan scanner disediakan oleh DPMPTSP. Karena keterbatasan dana, sementara hanya menasar 7 kelurahan yang memang cukup jauh dari kantor DPMPTSP. **(sya/adv)**

Pewarta : Syakurah

Editor : Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

drg Hena Ratnasari, Sp.KGA saat ditemui.

Klinik Gigi Anak RSUD Taman Husada Bontang Atasi Berbagai Permasalahan Gigi Anak

BONTANG – Klinik Kedokteran Gigi Anak milik RSUD Taman Husada Bontang melakukan perawatan gigi pada anak usia 0 sampai dengan 18 tahun. Untuk wilayah pemeriksaannya dimulai dari bagian bedah mulut, konservasi, prostodonti hingga ortodonti.

Dokter spesialis Kedokteran Gigi Anak RSUD Taman Husada Bontang, drg Hena Ratnasari, Sp. KGA mengatakan Kedokteran Gigi Anak memiliki cakupan yang lebih luas untuk pelayanan pada gigi anak. Ia mengatakan kedokteran gigi anak melakukan perawatan kepada permasalahan gigi anak seperti gigi berlubang, gigi terpendam (gigi impaksi) dan permasalahan gigi anak lainnya.

“Banyak permasalahan gigi anak

yang kami tangani dengan melakukan perawatan gigi seperti permasalahan odontektomi dan eksposur,” jelasnya kepada Mediakaltim.com, Kamis (16/11/2023).

Lanjut, drg Hena mengatakan pasien anak-anak setiap harinya bisa mencapai 20-25 anak dengan berbagai macam permasalahan gigi seperti permasalahan gigi dengan melakukan perawatan penambalan atau konservasi dan pencabutan serta orthodonti.

Ia mengharapkan tingkat karies atau gigi berlubang berkurang dengan melakukan perawatan gigi pada anak. “Gigi berlubang bisa sampai 80-90 persen. Perawatannya bisa dengan dicabut atau dengan melakukan penambalan gigi. Sering kali pa-

sien datang ke poli gigi anak dengan kondisi gusi dan pipi bengkak,” ungkapnya.

Sementara untuk ketersediaan SDM dokter spesialis gigi anak dan tenaga perawat gigi telah memenuhi dengan kapasitas satu dokter spesialis gigi anak dan masing-masing memiliki perawat gigi. Ia mengatakan pasien yang datang berasal dari pasien BPJS Kesehatan, Umum dan asuransi perusahaan.

“SDM di klinik gigi anak sudah cukup dengan ketersediaan SDM dan alat-alat medis standar untuk gigi anak,” terangnya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo

Editor: Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Pemeriksaan penyakit jantung oleh dokter spesialis jantung di RSUD Taman Husada Bontang.

Klinik Jantung RSUD Taman Husada Bontang Tangani Berbagai Macam Penyakit Jantung

BONTANG – Klinik Jantung Rumah Sakit Taman Husada Bontang melayani penderita penyakit jantung dan pembuluh darah.

Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dr Suhardi, Sp.JP mengatakan Poli Jantung buka sesuai jadwal rumah sakit setiap jam kerja. Ia mengatakan, pasien yang datang ke poli jantung memiliki bermacam penyakit seputar jantung dan pembuluh darah.

“Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah merupakan dokter yang ahli menangani penyakit seputar jantung dan pembuluh darah. Biasanya seperti penyakit jantung koroner, hypertensive heart disease, penyakit katup jantung, penyakit bawaan hingga gagal jantung,” jelas dr Suhardi, Sp.JP kepada Mediakaltim.com.

Dr Suhardi menambahkan pada

poli klinik jantung, dokter spesialis jantung juga memeriksa baik fisik maupun pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat-alat medis untuk jantung.

“Slain pemeriksaan fisik bisa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, EKG, Echocardiography, CT Coronary, Treadmill, Angiography Coronary dan Holter Jantung,” kata dr Suhardi.

Untuk proses pelayanannya sendiri, dr Suhardi mengataka poli klinik jantung sama dengan poli klinik lainnya di RSUD Taman Husada Bontang dengan melakukan pendaftaran secara online hingga pemeriksaan laboratorium dan ke apotek. Adapun pasien yang datang bisa mencapai 30 pasien per hari.

“Pendaftaran ke poli jantung bisa online kemudian antrean, dilakukan

pemeriksaan. Bisa laboratorium atau radiologi dan terakhir mengantre obat di apotek. Rata-rata kunjungan pasien 30 perhari,” ungkapnya.

Ia pun mengharapkan ke depannya, poli klinik jantung dapat menangani semua jenis penyakit jantung dengan menggunakan alat-alat medis yang terbaru yang dimiliki RSUD Taman Husada tanpa harus merujuk ke rumah sakit lainnya.

“Kebanyakan pasien BPJS. Asalkan sudah ada rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP). Selama ini berjalan lancar saja. Karena obat dan alat kesehatan sudah lumayan komplit,” terangnya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo

Editor: Nicha Ratnasari



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Apel personel Satpol PP PPU.

Sesuai Aturan, Urusan Trantibum di Sepaku Masih Kewenangan Satpol PP PPU

PPU-Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) di wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kini masih menjadi kewenangan Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU). Oleh karena itu, segala peraturan yang dimiliki daerah, harus pula dipatuhi di wilayah tersebut.

Hal itu ditegaskan Kepala Satpol PP PPU, Margono Hadi Sutanto, sesuai dengan surat Mendagri. Yang menyebutkan sampai Perpres pemindahan IKN terbit, maka kewenangan di Sepaku masih milik Satpol PP PPU termasuk trantibum.

"Makanya itu, bangunan-bangu-

nan yang tidak berizin di Sepaku terutama yang sudah ada sebelum IKN pindah, ditertibkan oleh Satpol PP' ujarnya, Kamis (16/11/2023).

Sekadar informasi, ada beberapa bangunan yang didapati tidak memiliki perizinan lengkap, namun beroperasi di IKN. Bangunan tersebut yakni batcing plan. Pun soal ini, lanjutnya, akan segera menelusuri administrasi bangunan tersebut.

"Apabila dibangun sebelum adanya kewenangan Otorita terkait perizinan, maka akan dilakukan penindakan," katanya.

Margono mengatakan bahwa se-

jauh ini kewenangan Otorita IKN, berkaitan dengan perizinan pembangunan baru. Sementara sebelum ada kewenangan Otorita IKN, maka yang berkewajiban melakukan penindakan adalah Pemkab PPU.

Dalam tiap aksi penindakan yang sudah, dan akan dilakukan itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Otorita IKN. Bentuk penindakan yang dilakukan yakni yustisi, dan tetap akan bekerjasama dengan Otorita IKN. "Sudah ada beberapa penertiban. Ini masih tahap identifikasi lagi, terus dilakukan selama itu masih kewenangan Kita," pungkas Margono. (ADV/SBK)



radar.

MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0853 4894 3982

www.radaribukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarbalkpapan.com



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Kepala Satpol PP PPU Margono Hadi Susanto saat ditemui di ruangannya.

Seiring Pembangunan IKN, Satpol PP PPU Terus Identifikasi Izin Bangunan di Sepaku

PPU - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Penajam Paser Utara (PPU) terus melakukan identifikasi kelengkapan administrasi bangunan yang berdiri di kawasan KIPP Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai dukungan terhadap menjaga kondusifitas serta keamanan dan ketertiban masyarakat dalam proses pemindahan ibu kota negara yang baru.

Seperti diketahui, fokus pembangunan infrastruktur pendukung IKN berada di sebagian wilayah di daerah berjuduk Benuo Taka itu, yakni di Kecamatan Sepaku. Patut diketahui pula, hingga kini wilayah kawasan tersebut masih masuk dalam kewenangan administrasi PPU.

"Kami menelusuri kelengkapan administrasi bangunan yang berdiri

di IKN," kata Kepala Satpol PP PPU, Margono Hadi Susanto baru-baru ini.

Kegiatan identifikasi bangunan di wilayah itu sudah dilaksanakan semenjak awal tahun ini. Selama ini, telah ada sejumlah bangunan yang berdiri di kawasan tersebut tidak memiliki kelengkapan perizinan.

Di antaranya tempat produksi beton curah siap pakai (batching plant). "Beberapa sudah Kami tindak, dengan melakukan teguran dan penertiban," sebutnya.

Sesuai aturan, apabila bangunan yang berdiri tanpa memiliki kelengkapan perizinan tersebut ada sebelum kewenangan Otorita IKN, maka Satpol PP PPU bakal melakukan penindakan. Pun dalam koordinasi aksi itu, pihaknya bekerjasama dengan

Bagian Hukum Otorita IKN.

Menurut Margono, sebelum ada kewenangan Otorita IKN yang berkeajiban melakukan penindakan terhadap bangunan liar atau tanpa izin di kawasan IKN ialah Pemkab PPU. Sesuai surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yaitu sebelum Peraturan Presiden (Perpres) pemindahan IKN terbit kewenangan di Kecamatan Sepaku masih Satpol PP PPU, termasuk ketentraman dan ketertiban umum (trantibum).

"Bangunan-bangunan liar atau tidak berizin di Kecamatan Sepaku, terutama yang berdiri sebelum ibu kota negara Indonesia pindah tetap akan ditertibkan Satpol PP," tutup Margono. (ADV/SBK)



HUMAS SATPOL PP PPU FOR MEDIAKALTIMGROUP

Personel Satpol PP PPU saat melakukan pengamanan di kawasan Pelabuhan Penajam.

Tunjang Kinerja Trantibum Jelang IKN, Persone; Satpol PP Perlu Ditambah

PPU - Untuk menunjang peningkatan kerja ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) daerah, perlu adanya penambahan personel Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU). Sejalan dengan potensi penambahan penduduk jelang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saat ini, jumlah personel Satpol PP PPU yang ada berjumlah 248 orang. Terdiri dari Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 209 orang, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 39 orang. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP PPU, Denny Handayansyah menyebutkan kondisi wilayah di PPU memungkinkan banyak terjadi kerawanan sosial. Terlebih kehadiran

IKN di Sepaku, yang akan berbatasan langsung dengan wilayah PPU.

"Pertimbangannya karena wilayah Penajam Paser Utara ini luas, ditambah ada lagi IKN," ungkapnya baru-baru ini.

Terbaru ini saja, Satpol PP sudah mengamankan empat orang PSK yang datang dari luar daerah. Karena menganggap PPU semakin ramai, setelah IKN berada di Kaltim.

Kondisi tersebut dikhawatirkan terus terjadi, hingga pasca pemindahan pusat negara itu terjadi. Sehingga harus dimitigasi dengan menambah personel yang akan bertugas nantinya.

"Satpol PP jelas dibutuhkan se-

bagai penegak perkara. Di mana Satpol PP sebagai pioner menjaga trantibummas, yakni penegakkan perda dan perbup" terangnya.

Selain itu, tidak hanya penambahan jumlah personel, kejelasan status ratusan THL Satpol PP juga dinantikan. Setidaknya, pada pengadaan PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendatang, pemerintah daerah bisa memberikan formasi untuk Satpol PP.

"Satpol PP ini ada 209 THL yang menantikan kepastian status baik itu PNS, PPPK, atau yang terbaru ini PNS part time," tutup Denny. (ADV/SBK)



MERCURE

HOTELS

SAMARINDA



KARNAVALL Batik Nusantara

Rayakan warisan budaya Batik bersama
ALL - Accor Live Limitless di Indonesia.

Nikmati sarapan gratis dan dapatkan
harga khusus serta pengalaman berbeda

Pesan & menginap hingga 31 Desember 2023.

Book, stay, enjoy
THAT'S ALL.COM



SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:



@ibishotelsamarinda



0811 - 551 - 6000

all.accor.com



Kejaksaan Negeri Balikpapan musnahkan barang bukti terkait dengan 253 kasus pidana dari Juni hingga Oktober 2023.

Kejari Balikpapan Musnahkan 253 Barang Bukti Kasus Pidana

BALIKPAPAN - Kejaksaan Negeri Balikpapan menggelar pemusnahan Barang Bukti (BB) dari 253 perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Pemusnahan dilaksanakan di halaman parkir kantor Kejaksaan yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman, Kamis (16/11/2023).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Balikpapan, Selamat Riyanto mengatakan, pemusnahan BB ini bertujuan untuk menjamin bahwa BB yang berkaitan dengan tindak pidana tidak ada yang tersisa atau hilang akibat ulah oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Kami juga ingin memberitahu

masyarakat bahwa BB ini sudah kami musnahkan, jadi tidak perlu ada keraguan atau pertanyaan tentang nasib BB dari tindak pidana ini," ujarnya.

Lebih lanjut Selamat Riyanto menjelaskan, pemusnahan BB ini sesuai dengan putusan PN Balikpapan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah).

"Saya harap dengan pemusnahan BB ini, masyarakat bisa lebih sadar dan menjauhi tindak pidana, khususnya narkoba yang sangat merusak generasi bangsa," jelasnya.

Acara yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari instansi seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Polresta Balikpapan, Badan

Narkotika Nasional Kota (BNNK), Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), untuk BB berupa sabu dan pil dicampur dengan bahan kimia lainnya dan dihancurkan dengan menggunakan belender.

Sementara untuk BB lainnya, seperti kosmetik ilegal, obat herbal, HP dan timbangan mini, disatukan dalam sebuah drum dan dibakar. Sedangkan senjata tajam (Sajam) dipotong dengan mesin gerinda agar tidak bisa digunakan lagi.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Ketiga tersangka bersama batang bukti setelah diamankan Satreskoba Polres Kutar.

Gagalkan Peredaran 3 Kg Ganja, Satreskoba Polres Kutar Tangkap 3 Orang Pria

TENGGARONG - Gagalkan peredaran narkotika jenis ganja, Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Kutai Kartanegara (Kutar) amankan tiga orang tersangka. Penangkapan ini diungkapkan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Hari Rosena, melalui Kasat Resnarkoba AKP Aksarudin Adam, pada Kamis (16/11/2023) kemarin.

Aksaruddin mengungkapkan, tiga orang yang berhasil timnya ringkus adalah ERR (33), PAV (28) dan HPP (35). Dari tangan ketiganya didapati barang bukti berupa 3 kg ganja kering siap edar.

Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat, yang memberikan informasi bahwa di Jalan Arwana, Kelurahan Timbau, Kutar, terdapat pria yang kerap membawa narkotika.

Berdasarkan informasi tersebut, Aksarudin memimpin langsung timnya melakukan penyelidikan di lokasi

yang dilaporkan. Setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari, polisi mencurigai seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan.

"Tersangka yang pertamakali diamankan adalah ERR," kata Aksarudin.

Akhirnya pada Senin (13/11/2023) malam, EER ditangkap di RT 48 Jalan Maduningrat, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. Ia diringkus setelah Polisi membuntutinya saat keluar dari rumahnya di Jalan Arwana Blok D, Kelurahan Timbau.

Setelah diamankan dan diinterogasi, EER mengaku menyimpan satu bungkus besar ganja di kediamannya. Barang haram tersebut ia dapatkan dari dua orang rekannya PAV dan HPP.

Berdasarkan keterangan EER, Polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap PAV, yang merupakan kurir di salah satu perusahaan jasa ekspedisi di Jalan PM

Noor, Sempaja, Kota Samarinda. Dari tangan PAV didapati 1 buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan EER.

Sedangkan HPP diamankan di Jalan Wahid Hasyim I, Gang Kampus Biru Kelurahan Sempaja Selatan. Dengan barang bukti 1 bungkus besar ganja kering, 1 bungkus sedang ganja kering, 73 poket kecil ganja siap edar.

Kemudian di rumah kontrakannya Jalan Wira Tirta Gang Senggol, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, ditemukan kembali 6 bungkus kecil ganja kering.

"Ketiga pelaku ERR, PAV dan HPP akan dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Juncto Pasal 111 Ayat 2 UURU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



Usai memberikan arahan Danrem 091/ASN Brigjen TNI Yudhi Prasetyo foto bersama dengan Dandim 0912 Kubar Letkol CZI Eko Handoyo dan muspika Kecamatan Muara Pahu.

Kunjungi Koramil Muara Pahu, Danrem 091/ASN Ingatkan Jaga Netralitas pada Pemilu 2024

KUTAI BARAT - Danrem 091/ASN Brigjen TNI Yudhi Prasetyo beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Koramil Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat pada Rabu, (15/11/2023).

Dalam kunjungan kali ini, Danrem 091/ASN dan rombongan berangkat dari Makorem 091/ASN menuju Kutai Kartenegro dan Kutai Barat melalui jalan darat

menggunakan sepeda motor trail dengan pengawalan berjumlah 10 personil dari Denpom VI/I Samarinda provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Danrem 091/ASN dan rombongan tiba di Koramil 0912-05 Muara Pahu sekira pukul 11.00 Wita siang dan disambut oleh Dandim 0912 Kutai Barat Letkol CZI Eko Handoyo, Danramil 0912-05 Muara Pahu Kapten Inf

Ade Tiana serta muspika Kecamatan Muara Pahu.

Acara dilanjutkan dengan Danrem memberikan pengarahannya singkat kepada anggota Koramil 0912-05 Muara Pahu.

Danrem 091/ASN Brigjen TNI Yudhi Prasetyo menegaskan kepada anggota Koramil 0912-05 Muara Pahu untuk selalu menjaga netralitas dan wujudkan Pemilu yang damai.





“Pemilu damai yang dimaksudkan adalah selalu menjaga netralitas, humanis, menjaga sinergitas sesama aparat dan unsur pemerintahan daerah, disiplin, menjaga kebersihan, dan menjaga keberanekaragaman antara

sesama,” tegasnya.

Untuk diketahui, setelah melakukan kunjungan kerja di Koramil 0912-05 Kecamatan Muara Pahu, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Yudhi Prasetyo beserta rombongan kemudian berto-

lak menuju kota Samarinda menggunakan transportasi speedboat.

Penulis : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari



LET'S GO TOYOTA



SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN

TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel







Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088





AUTO 2000

member of ASTRA

Bontang

Drusen Toyota lebih mudah!



TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigas Kencana No. 116A, Sebelang No. Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS
di Digiroom

Kode Promo BTSOLI

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

TMS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

*Syarat dan ketentuan berlaku

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang